

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN SDM GURU TERHADAP PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS DI INDONESIA

Nadira Putri Riyanci *¹
Silvia Ayu Tri Octavia ²
Inaya Regita Cahyani ³
Keysia Jesika Intansari ⁴
Felisha Rahma Antoni ⁵
Trenda Aktiva Oktariyanda ⁶
Meirinawati ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Negeri Surabaya

*e-mail : 25040674133@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674098@mhs.unesa.ac.id²,
25040674132@mhs.unesa.ac.id³, 25040674091@mhs.unesa.ac.id⁴, 25040674129@mhs.unesa.ac.id⁵
, trendaoktariyanda@unesa.ac.id⁶, meirinawati@unesa.ac.id⁷

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) guru dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, seperti buku, jurnal, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru melalui kebijakan dan program, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, program Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, serta pemberian tunjangan kesejahteraan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketimpangan distribusi guru, terbatasnya akses pelatihan terutama di daerah 3T, keterbatasan anggaran, serta masih banyak guru yang belum tersertifikasi. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan antara hasil yang dicapai dengan tujuan kebijakan. Peningkatan jumlah guru bersertifikat belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini terlihat dari capaian hasil belajar siswa Indonesia yang masih relatif rendah berdasarkan data PISA 2022. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan implementasi kebijakan secara lebih terarah, termasuk pemerataan akses pengembangan kompetensi dan penguatan pelatihan berbasis kebutuhan, agar profesionalisme guru dan mutu Pendidikan dapat meningkat secara optimal.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan; PPG; Kualitas Pendidikan; Manajemen SDM; Profesionalisme guru.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of teacher Human Resource (HR) management policies to improve the professionalism of educators in senior high schools (SMA) in Indonesia. The method used is a descriptive qualitative approach through literature studies utilizing various secondary data sources, such as books, journals, and official reports. The results show that the government has made various efforts to improve teacher quality and professionalism through policies and programs, such as Law Number 14 of 2005, the Teacher Professional Education (PPG) program, certification, and the provision of welfare benefits. However, the implementation of these policies still faces various obstacles, including unequal distribution of teachers, limited access to training, especially in 3T areas, budget constraints, and the continued presence of many uncertified teachers. Furthermore, a gap was found between the results achieved and the policy objectives. The increase in the number of certified teachers has not fully impacted the quality of learning. This is evident in the relatively low learning outcomes of Indonesian students based on PISA 2022 data. Therefore, more targeted improvements in policy implementation are needed, including equalizing access to competency development and strengthening needs-based training, so that teacher professionalism and education quality can be optimally improved.

Keywords: Education Policy; Education Quality; Human Resource Management; PPG; Teacher professionalism.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menentukan masa depan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh berbagai komponen, salah satunya adalah kualitas tenaga pendidik. Guru memiliki pengaruh besar dalam proses pembelajaran, karena guru tidak hanya bertugas sebagai penyampai materi, tetapi juga membentuk karakter, mengembangkan potensi peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Oleh karena itu, profesionalisme guru menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Menurut Herman dkk. (2022), kompetensi profesional guru berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pengelolaan tenaga pendidik menjadi sangat penting. Manajemen guru mencakup proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta evaluasi kinerja guru agar mampu menjalankan tugas secara profesional.

Pengelolaan guru yang baik akan membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan secara efektif. (Nasution dkk., 2023) menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan *workshop*, dan supervisi akademik dapat meningkatkan profesionalisme guru. Selain itu, Wahyuni dan Nugraha (2023) menyatakan bahwa pengelolaan tenaga pendidik yang terarah dan terencana merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

Menurut UU Nomor 14 pasal 10 ayat (1) yang membahas tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa guru atau tenaga pendidik harus memenuhi empat standar kompetensi utama yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan adanya standar kompetensi tersebut, seorang guru akan menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat menciptakan lingkungan belajar dengan efektif dan menarik. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan manajemen SDM tenaga pendidik diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profesionalisme tenaga pendidik. Semakin baik pengelolaan SDM tenaga pendidik, semakin baik pula profesionalisme yang dimiliki tenaga pendidik tersebut. Dengan begitu, pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dengan didukung oleh pengajar yang profesional (Syaidah et al., 2018).

Namun, implementasi kebijakan manajemen SDM guru di sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Masih terdapat ketimpangan kompetensi antar guru, kurang optimalnya pelatihan dan pengembangan profesi, anggaran dan kesejahteraan, distribusi dan beban kerja, serta masih belum meratanya kesempatan peningkatan kapasitas guru. Kondisi ini dapat menghambat peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan akan berdampak kepada kualitas pembelajaran siswa. Rahman dkk. (2022) menyebutkan bahwa peningkatan mutu tenaga pendidik memerlukan manajemen yang terstruktur dan dukungan yang berkelanjutan, agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif.

Berdasarkan masalah di atas, kesenjangan antara kebijakan dengan realita di lapangan benar adanya. Menurut data yang didapat dari Data Pokok Pendidik (Dapodik) yang dikutip dalam Kemendikdasmen, Hingga saat ini masih terdapat 1,4 juta tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik dan belum berkualifikasi S-1/D-IV. Pemerintah telah melakukan upaya permasalahan tersebut melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang meluluskan 598.566 guru pada tahun 2024. Meskipun pemerintah menetapkan target sertifikasi bagi 800.000 guru pada tahun 2025, realisasi di lapangan menunjukkan hanya 728.697 guru yang berhasil lulus

seleksi administrasi. Walaupun angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelumnya, capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, 1,4 juta guru yang belum tersertifikasi tetap menjadi tantangan besar yang perlu segera ditindaklanjuti.

Kondisi tersebut berdampak pada kualitas pembelajaran nasional yang belum optimal. Hal ini terbukti pada hasil *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2022 yang dirilis tahun 2023. Indonesia menduduki peringkat 68 dari 81 negara dan posisi ini meningkat 5-6 peringkat dari tahun 2018. Meskipun Indonesia mengalami peningkatan peringkat, namun capaian skor pada ketiga komponen masih belum memuaskan. Skor literasi Indonesia tercatat sebesar 359 dimana skor yang didapatkan lebih rendah 12 poin dari tahun 2018, lalu pada literasi matematika memperoleh skor 366 dengan penurunan sebesar 13 poin, dan sains yang mendapat skor 388 dengan penurunan sebesar 13 poin. Secara keseluruhan, Indonesia masih jauh di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan negara maju lain. Dengan adanya kondisi tersebut, semakin memperjelas bahwa profesionalisme tenaga pendidik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ekspektasi. Dengan skor tersebut, terlihat masih ada murid yang belum menguasai materi dengan benar dan perlu mempertanyakan kompetensi pengajarnya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan manajemen SDM pengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia serta menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan profesionalisme pengajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi tenaga pendidik di Indonesia, lalu bagi dinas pendidikan dalam merancang program pengembangan guru yang lebih efektif dan merata, serta bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dalam menyempurnakan regulasi manajemen SDM tenaga pendidik agar dapat mewujudkan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia (SDM) guru dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan serta fenomena yang telah terdokumentasi dalam berbagai sumber ilmiah dan laporan resmi.

Pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder, yang mana menurut Hasan (2002) Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi pemerintah (seperti Kemendikbudristek dan OECD), serta regulasi yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Proses pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian substansi dengan fokus penelitian, tingkat kredibilitas dan validitas sumber, serta aspek kebaruan yang dibatasi dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2014–2025). Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini mengacu pada sekitar 15–25 literatur utama yang dinilai representatif dalam menjelaskan fenomena yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, menelaah, serta mengorganisasi berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah diseleksi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang mencakup proses reduksi data, pengelompokan informasi ke dalam tema-tema utama (kebijakan pemerintah, implementasi kebijakan, kendala, dan dampak kebijakan), serta

interpretasi data dengan mengaitkannya pada kerangka teori implementasi kebijakan, khususnya model Edward III. Tahap akhir analisis dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, implementasi kebijakan manajemen sumber daya guru di Indonesia telah diatur melalui kebijakan pemerintah. Salah satunya yakni, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang menetapkan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikat pendidik. Dengan ini pemerintah menyelenggarakan berbagai program untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru. Program ini mencakup 11 program, salah satunya yakni Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG ini adalah program yang berfokus pada penuntasan perolehan Sertifikat Pendidik (Serdik) bagi Calon Guru (Prajabatan) dan Guru Tertentu (Dalam Jabatan) yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidik yang profesional dan kompeten di seluruh Indonesia. Selain itu juga terdapat program lainnya seperti Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV, Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial, Peningkatan Kompetensi Guru BK, Program Kepemimpinan Sekolah (Pelatihan BCKS) , Gerakan Numerasi Nasional, Sekolah Rakyat. Serta terdapat tunjangan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru seperti, Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), Tunjangan Guru, Bantuan Insentif, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Guru NonASN, dan program Bantuan Rumah Guru. Semua program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para guru.

Dalam pelaksanaannya terdapat upaya yang nyata untuk meningkatkan kualitas guru yang terlihat dari jumlah guru yang terus meningkat untuk mengikuti program PPG. Namun, realita di lapangan program PPG ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat guru yang belum memenuhi beberapa kualifikasi administrasi. Selain itu, program ini belum merata ke daerah yang terpencil karena terdapat keterbatasan akses dan fasilitas yang ada. Sehingga meskipun program ini dirancang dengan baik, dalam realita implementasinya terdapat tantangan yang perlu diperbaiki agar tujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru tercapai dengan maksimal.

Profesionalisme guru pada hakikatnya merujuk pada pemenuhan empat kompetensi utama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Keempat kompetensi ini merupakan indikator fundamental dalam mengevaluasi kualitas serta kinerja guru dalam proses pembelajaran. Di samping itu, kapasitas dalam mengelola pembelajaran secara efektif, penguasaan substansi materi ajar serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi pembelajaran juga belum cukup mahir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang ditempuh untuk meningkatkan profesionalisme guru belum sepenuhnya membuahkan hasil yang optimal meski sudah diselenggarakan program-program untuk meningkatkan profesionalisme guru. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa penguatan implementasi kebijakan masih sangat diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan profesionalisme guru dapat terwujud.

Profesionalisme guru memiliki korelasi langsung terhadap kualitas penyelenggaraan pembelajaran di Indonesia. Pada dasarnya program-program peningkatan profesionalisme dirancang untuk memperkuat kapasitas guru dalam mengelola serta melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Namun, hal ini belum menunjukkan progres yang signifikan dalam hal pemilihan metode pengajaran, kedalaman penguasaan materi ajar maupun pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Apabila di tinjau dari hasil capaian belajar

peserta didik, prestasi pendidikan Indonesia secara umum masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Data yang bersumber dari *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2022 yang dirilis tahun 2023. Indonesia menduduki peringkat 68 dari 81 negara dan posisi ini meningkat 5-6 peringkat dari tahun 2018. Berdasarkan laporan, skor rata-rata siswa Indonesia di PISA 2022 adalah 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains. Skor ini masih di bawah rata-rata negara OECD, yaitu 472 untuk matematika, 476 untuk membaca, dan 485 untuk sains, tetapi telah mengalami peningkatan peringkat signifikan dibandingkan tahun 2018.

Implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia (SDM) guru di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural. Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan distribusi guru, yang menunjukkan konsentrasi tenaga pendidik di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil masih mengalami kekurangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerataan guru belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil satuan pendidikan, melainkan masih dipengaruhi oleh keterbatasan perencanaan dan mekanisme penempatan.

Selain itu, keterbatasan jumlah guru di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perencanaan kebijakan dan kebutuhan aktual di lapangan, yang berdampak pada meningkatnya beban kerja guru serta menurunnya efektivitas pembelajaran. Dalam konteks pengembangan profesional, program pelatihan guru juga belum berjalan optimal karena masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan kompetensi kontekstual. Dari perspektif manajemen publik, keterbatasan anggaran menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah menyebabkan kualitas pelaksanaan program pengembangan guru tidak merata. Kondisi ini mencerminkan lemahnya dimensi sumber daya (resources) dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan Edward III, yang menempatkan ketersediaan sumber daya sebagai faktor kunci keberhasilan kebijakan (OECD, 2020). Di sisi lain, belum meratanya sertifikasi dan kualifikasi akademik guru menunjukkan bahwa standar profesionalisme yang ditetapkan secara normatif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik. Meskipun jumlah guru berkualifikasi S1/D4 terus meningkat, disparitas kualitas antarwilayah masih terjadi, sehingga kebijakan sertifikasi belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen peningkatan mutu.h

Dalam implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi, pemerintah menetapkan target percepatan pemenuhan standar kompetensi guru secara nasional. Salah satu target utama adalah percepatan sertifikasi guru untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah guru di Indonesia mencapai sekitar 3–3,3 juta orang, dengan sekitar 1,3–1,8 juta guru telah memiliki sertifikat pendidik atau setara dengan 44%–55% dari total guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam pelaksanaan program sertifikasi dan PPG, masih terdapat lebih dari satu juta guru yang belum tersertifikasi. Pemerintah sendiri menargetkan percepatan sertifikasi bagi sekitar 1,2 juta guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) hingga tahun 2025–2026.

- Meskipun secara kuantitatif terdapat peningkatan jumlah guru bersertifikat, dampaknya terhadap kualitas pembelajaran masih belum signifikan. Besaran

tunjangan profesi guru yang diberikan kepada guru bersertifikat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dengan implementasi teknis sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Keuangan. Guru yang bersertifikat ASN menerima tunjangan sebesar satu kali gaji pokok yang berkisar antara Rp1,6 juta hingga Rp5,8 juta per bulan, sedangkan guru non-ASN memperoleh sekitar Rp2 juta per bulan. Secara nasional, lebih dari 1,8 juta guru telah menerima TPG, yang terdiri atas guru PNS, PPPK, dan non-ASN, dengan realisasi anggaran mencapai sekitar Rp14,72 triliun pada tahun 2025.

Terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan (implementation gap). Secara normatif, kebijakan sertifikasi dan PPG bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru. Namun, dalam praktiknya, besarnya alokasi anggaran dan cakupan penerima menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi lebih dominan berdampak pada dimensi ekonomi dan kesejahteraan guru. Berbagai studi dan indikator pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat dari masih rendahnya capaian pembelajaran siswa Indonesia dalam asesmen internasional PISA, yang menunjukkan bahwa peningkatan status profesional guru belum sepenuhnya berdampak pada kualitas pembelajaran siswa. Dari perspektif manajemen publik, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk implementation gap, di mana output kebijakan (peningkatan jumlah guru bersertifikat) tidak sepenuhnya sejalan dengan outcome kebijakan (peningkatan kualitas pendidikan). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa fokus kebijakan masih dominan pada pemenuhan indikator formal, sementara aspek substantif seperti peningkatan kompetensi pedagogik berbasis praktik, penguatan refleksi pembelajaran, serta evaluasi kinerja guru di kelas masih belum optimal.

Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan profesionalisme guru melalui program-program belum mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan hasil belajar secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun kebijakan program yang diimplementasikan memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kualitas pembelajaran, dampaknya masih bersifat parsial dan belum merata. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi yang lebih serius dan terstruktur agar tujuan dari kebijakan program dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia guru di Indonesia telah diupayakan melalui berbagai regulasi dan program pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, program Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, peningkatan kualifikasi akademik, hingga pemberian tunjangan kesejahteraan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik agar kualitas pendidikan nasional semakin baik.

Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti ketimpangan distribusi guru, belum meratanya akses pelatihan terutama di daerah 3T, keterbatasan anggaran, serta masih banyak guru yang belum tersertifikasi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas di lapangan (*implementation gap*), di mana output kebijakan berupa meningkatnya jumlah guru bersertifikat belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. (*UU NOMOR 14 TAHUN 2005 GURU DAN DOSEN*, n.d.)

Hal tersebut terlihat dari capaian hasil belajar siswa Indonesia yang masih rendah berdasarkan data PISA 2022, sehingga profesionalisme guru belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih terstruktur, pemerataan akses pengembangan kompetensi guru, penguatan pelatihan berbasis kebutuhan nyata, serta pengawasan implementasi kebijakan agar tujuan peningkatan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tercapai secara lebih efektif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2024). *Kemendikbudristek kejar sertifikasi PPG 1,2 juta guru agar tuntas 2025*.
<https://www.antaraneews.com/berita/4246819/kemendikbudristek-kejar-sertifikasi-ppg-12-juta-guru-agar-tuntas-2025>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2026). *Indonesia UNFPA percepat target SDGs melalui program kerja sama siklus 11 (2026–2030)*.
<https://www.bappenas.go.id/id/berita/indonesia-unfpa-percepat-target-sdgs-melalui-program-kerja-sama-siklus-11-2026-2030-0FbMI>
- Dataloka. (2025). *Jumlah guru di Indonesia 2024–2025 tembus 4,21 juta, terbanyak di jenjang SD*.
<https://dataloka.id/humaniora/4320/jumlah-guru-di-indonesia-2024-2025-tembus-421-juta-terbanyak-di-jenjang-sd/>
- Herman, M., et al. (2022). Implementasi kompetensi profesional guru sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Sumber Daya Manusia*.
<https://journal.umkendari.ac.id/jimsh/article/view/399>
- Kemendikdasmen. (2025). *Penuntasan Sertifikasi Guru melalui Program PPG bagi Guru Tertentu 2025*. Kemendikdasmen.Go.Id. <https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/13530-penuntasan-sertifikasi-guru-melalui-program-ppg-bagi-guru-te>
- Kemendikdasmen. (2023). *Peringkat Indonesia pada PISA 2022 Naik 5-6 Posisi Dibanding 2018*.
ditsd.kemendikdasmen.go.id.
<https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/artikel/detail/peringkat-indonesia-pada-pisa-2022-naik-5-6-posisi-dibanding-2018#>
- Kemendikdasmen. (2025). *Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru*.
www.kemendikdasmen.go.id. <https://www.kemendikdasmen.go.id/program/Peningkatan-Kualifikasi-Kompetensi-dan-Kesejahteraan-Guru>

- Kompas.com. (2024). *Berapa gaji dan tunjangan guru PNS, PPPK, dan honorer 2025*.
<https://www.kompas.com/edu/read/2024/11/30/154948971/berapa-gaji-dan-tunjangan-guru-pns-pppk-dan-honorer-2025?page=all>
- Nasution, P., et al. (2023). Manajemen pengembangan kompetensi profesional guru di SMA Negeri 1 Model Tanjung Pura. *Jurnal Inovasi Administrasi*.
<https://jurnal.perima.or.id/index.php/JIA/article/view/221>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 results (Volume I & II): Country notes Indonesia*. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html
- Pendidikan, P. A. (2024). *PERILISAN HASIL PISA 2022: PERINGKAT INDONESIA NAIK 5-6 POSISI*. Puspendik.Kemendikdasmen.Go.Id.
<https://pusmendik.kemendikdasmen.go.id/pisa//berita/read/pisa-di-indonesia/4/perilisan-hasil-pisa-2022-peringkat-indonesia-naik-5-6-posisi/>
- Rahman, H., et al. (2022). Penerapan manajemen peningkatan mutu tenaga pendidik. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/3128>
- Syaidah, U., Suyadi, B., & Ani, H. M. (2018). Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Di Sma Negeri Rambipuji Tahun Ajaran 2017/2018. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(2), 185.
<https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8316>
- UU NOMOR 14 TAHUN 2005 GURU DAN DOSEN*. (n.d.). Retrieved [https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU NOMOR 14 TAHUN 2005@GURU DAN DOSEN.pdf#:~:text=\(1\) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru%2C baik,dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Universitas Negeri Surabaya. \(n.d.\). *Skor PISA acuan kualitas SDM negara*.
<https://s1pbing.fbs.unesa.ac.id/post/skor-pisa-acuan-kualitas-sdm-negara>](https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2014%20TAHUN%202005@GURU%20DAN%20DOSEN.pdf#:~:text=(1)%20Pemerintah%20wajib%20memenuhi%20kebutuhan%20guru%20baik,dasar%20dan%20menengah%20yang%20diselenggarakan%20oleh%20Pemerintah%20Universitas%20Negeri%20Surabaya.&hl=en)
- Wahyuni, F. S., & Nugraha, M. S. (2023). Implementasi pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://ejournal.stai-tbh.ac.id/al-aulia/article/view/1848>
- World Bank. (2014). *Teacher reform in Indonesia: The role of politics and evidence in policy making*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/726801468269436434>